



Judul : Kerja Sama IklimMakin Ditingkatkan
Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

KONFERENSI GLASGOW

Kerja Sama IklimMakin Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS — Konferensi Perubahan Iklim Ke-26 atau COP 26 di Glasgow, Skotlandia, November tahun lalu menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya Pakta Iklim Glasgow. Pakta ini membuka berbagai peluang untuk meningkatkan penanganan perubahan iklim, seperti kerja samayang lebih konkret, termasuk terkait pasar karbon. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) LaksmiDhewanthi mengemukakan, secara garis besar Pakta Iklim Glasgow berisi urgensi tentang peningkatan ambisi dan aksimitigasi, adaptasi, serta pendanaan perubahan iklim. Hal inidibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan dalam implemen-tasi dan tujuan Kesepakatan Paris 2015."Bagi Indonesia, kita meletakkan pilar adaptasi sama pen-tingnya dengan mitigasi. Masuknya aspek adaptasi dalam Pakta Iklim Glasgow akan sangat bermanfaat dan mendorong kita mencapai agenda perubahan iklim di Indonesia," ujar Laksmi dalam diskusi daring, Kamis (13/1/2022). Pakta Iklim Glasgow menekankan pentingnya mengintegrasikan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagaitingkatan perencanaan, mulai dari lokal, subnasional, nasional, hingga regional. Selain itu, peningkatan mobilisasi sumberdaya pendanaan ataupun transfer teknologi juga ditekankan dalam Pakta Iklim Glasgow. Pakta Iklim Glasgow juga menunjukkan kembali desakan kepada negara-negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan bagi upaya mengatasi perubahan iklim. Pakta Iklim Glasgow telah meningkatkan kepercayaan komunitas global terhadap upaya multilateral dalam membatasi peningkatan suhu rata-rata Bumi tidak melebihi dari 1,5 derajat celsius. Konsensus baru Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Hari Prabowo mengatakan, Pakta Iklim Glasgow telah menjadi konsensus baru tentang penanganan perubahan iklim yang lebih kuat dibandingkan Kesepakatan Paris. Sebab, Pakta Iklim Glasgow untuk pertamakalinya turut mengakui bahwa bahan bakar fosil merupakan salah satu penyebab perubahan iklim dan setiap negara harus mengurangi penggunaannya. Hari menilai, Pakta Iklim Glasgow telah membuka peluang bagi banyak negara untuk meningkatkan penanganan perubahan iklim, termasuk Indonesia. Peluang pertama yang bisa diperoleh Indonesia dari Pakta Iklim Glasgow adalah peningkatan kerja sama yang lebih konkret dalam bentuk dukungan pendanaan, investasi, ataupun kolaborasi lain." Pakta Iklim Glasgow mendorong negara-negara maju untuk melipatgandakan pendanaan iklim dibandingkan tahun 2019 dengan target pencapaian pada 2025. Indonesia telah memiliki berbagai skema bilateral, seperti satuan tugas iklim Indonesia-AS," tuturnya. Selain itu, Indonesia juga berpeluang mengoperasikan pasar karbon global. Hal ini menyusul tercapainya kesepakatan artikel 6 tentang kerja sama pasar karbon dalam COP 26. Saat ini, Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Menurut Hari, pengoperasian pasar karbon global membuka peluang pelibatan aktor non-pemerintah, termasuk kelompok bisnis, untuk menjadi elemen penting penanganan perubahan iklim melalui insentif nilai ekonomi karbon. Untuk memaksimalkan hasil pasar karbon global, diperlukan juga sinergi dan inisiatif di forum dan kesepakatan internasional, termasuk presidensi G-20. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Roma, Italia, Oktober 2021, menetapkan 61 paragraf deklarasi para pemimpin dunia. Dari total paragraf deklarasi tersebut, 9 paragraf diantaranya merupakan isu mengenai perubahan iklim, 4 paragraf terkait lingkungan, dan 2 paragraf tentang transisi energi. Isu utama tentang perubahan iklim yang berkembang dalam deklarasi tersebut antara lain akselerasi pengurangan emisi, penetapan kerangka waktu menuju nol emisi, serta ketersediaan teknologi dan pendanaan. Selain itu, isu utama lingkungan, yakni pelestarian keanekaragaman hayati dan penanganan degradasi tanah. (MTK)